



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2013-2018

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018, bahwa Renstra SKPD merupakan bagian dari RPJMD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya RPJMD merupakan gradasi dari renstra SKPD. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra SKPD selama lima tahun. Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018 dimaksudkan sebagai dasar bagi seluruh *stakeholders* subsektor perkebunan dan setiap elemen aparatur di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan selama jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam penyusunan Renstra, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Isu-isu strategis serta analisis *strengths, weaknesses, opportunities* dan *threats* (SWOT).

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah terkait dengan perencanaan kebijakan maupun program/kegiatan. Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan, sebagai berikut :

- Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan perkebunan
- Kinerja layanan jasa ekosistem dari kawasan bernilai konservasi tinggi terhadap usaha perkebunan

Isu strategis merupakan permasalahan pokok maupun tantangan yang berkaitan dengan fenomena global baik regional, nasional, maupun internasional baik yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun



sebelumnya maupun situasi baru yang muncul akibat perubahan era. Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan, maka isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pembangunan subsektor perkebunan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu lima tahun ke depan, meliputi :

- Pembangunan Sejuta Hektar Kelapa Sawit Tahap Kedua
- Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan
- Integrasi Sawit – Sapi
- Pembangunan Perkebunan Daerah Perbatasan
- Pemberdayaan Masyarakat Miskin

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan dengan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur seluruh komponen *stakeholder* pembangunan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 46 tahun 2008, maka Visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang ingin diwujudkan melalui pembangunan subsektor perkebunan selama tahun 2013-2018 adalah ***"Terwujudnya Perkebunan yang Tangguh untuk Mendukung Agroindustri dan Ekonomi Hijau"***

2. Misi

Setelah perumusan visi pembangunan di subsektor perkebunan, tahapan selanjutnya adalah menjabarkan visi tersebut menjadi misi-misi yang akan diemban oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama masa periode perencanaan pembangunan daerah. Pernyataan perwujudan visi melalui misi-misi Dinas Perkebunan dimaksudkan agar setiap elemen kelembagaan Dinas Perkebunan maupun pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui, mengenal, dan berpartisipasi aktif dalam melaksanakan setiap detail misi yang telah disepakati. Oleh sebab itu, dalam setiap peranan Dinas Perkebunan dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki tujuan yang jelas terutama dalam merealisasikan misi-misi sebagai berikut:



1. Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan
2. Meningkatkan Kualitas Dan Nilai Tambah Produk
3. Memperkuat Aspek Kelembagaan Dan Pemasaran
4. Mengembangkan Perkebunan Yang Berkelanjutan

3. Tujuan

Sebagai salah satu komponen penting dalam perencanaan strategis, **tujuan** dapat dirumuskan sebagai gambaran tentang keadaan yang diinginkan atau dicita-citakan oleh Dinas Perkebunan selama kurun waktu lima tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan Dinas Perkebunan merupakan sebuah upaya dalam mendukung pencapaian Program Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018.

Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 dapat dirincikan sebagai berikut:

- 3.1. Misi Pertama adalah Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan, yang mempunyai tujuan Meningkatkan produksi perkebunan,
- 3.2. Misi Kedua adalah Meningkatkan Kualitas dan Nilai Tambah Produk, yang mempunyai tujuan Meningkatkan produk berstandar nasional dan internasional dan Meningkatkan produk primer perkebunan menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi.
- 3.3. Misi Ketiga adalah Memperkuat Aspek Kelembagaan dan Pemasaran, yang mempunyai tujuan Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan petani serta pemasaran dan Meningkatkan peran pembinaan aparatur.
- 3.4. Misi Keempat adalah Mengembangkan Perkebunan yang Berkelanjutan, yang mempunyai tujuan Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan.

4. Sasaran

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perkebunan dalam periode lima tahun ke depan sesuai dengan penjabaran dari tujuan rencana strategis. Dari keenam tujuan Renstra



Dinas Perkebunan, dapat dirumuskan turunan tujuan berupa sasaran-sasaran perencanaan pembangunan subsektor perkebunan yang efektif dan efisien serta memiliki indikator yang spesifik, jelas, dan terukur sebagai bahan evaluasi, monitoring, dan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur periode 2013-2018 sebagai pendukung pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

- 4.1. Tujuan pertama, "Meningkatkan produksi perkebunan" dapat dicapai dengan sasaran Meningkatnya produksi kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dalam, dan lada, dengan indikator sebagai berikut:
 - Jumlah produksi (ton per tahun) setiap komoditas,
 - Tingkat produktivitas (ton/hektar per tahun) setiap komoditas, dan
 - Penambahan luas kebun (hektar) setiap komoditas.
- 4.2. Tujuan kedua, "Meningkatkan produk berstandar nasional dan internasional" dapat dicapai dengan sasaran Meningkatnya produk berstandar nasional dan internasional, dengan indikator sebagai berikut:
 - Persentase produk yang bersertifikasi (%).
- 4.3. Tujuan ketiga, "Meningkatkan produk primer perkebunan menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi" dapat dicapai dengan sasaran Meningkatnya nilai tambah produk perkebunan, dengan indikator sebagai berikut
 - Persentase penerapan teknologi ramah lingkungan (%).
- 4.4. Tujuan keempat, "Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan petani" dapat dicapai dengan sasaran Meningkatnya Kesejahteraan petani pekebun, dengan indikator sebagai berikut
 - Jumlah dan kemandirian kelompok tani/gapoktan
- 4.5. Tujuan kelima, "Meningkatkan peran dan pembinaan aparatur" dapat dicapai dengan sasaran Meningkatnya ketersediaan tenaga fungsional dan teknis perkebunan, dengan indikator sebagai berikut:



- Jumlah tenaga teknis fungsional/tahun

4.6. Tujuan keenam, "Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan" dapat dicapai dengan sasaran Menurunnya gas emisi rumah kaca subsektor perkebunan, dengan indikator Jumlah kegiatan yang dapat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pertahun. Sasaran kedua adalah Meningkatnya jumlah perusahaan perkebunan yang menerapkan prinsip-prinsip perkebunan yang berkelanjutan, diantaranya menerapkan ISPO/RSPO, dengan indikator Jumlah dan luas areal perusahaan perkebunan yang menerapkan ISPO/RSPO.

5. Indikator Kinerja

Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan definisi tersebut, indikator Kinerja dari Sasaran Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur seperti dalam tabel berikut :

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan produksi perkebunan	Meningkatnya produksi kelapa sawit	Jumlah produksi kelapa sawit (ton per tahun)
		Meningkatnya produksi karet	Jumlah produksi karet (ton per tahun)
		Meningkatnya produksi kakao	Jumlah produksi kakao (ton per tahun)
		Meningkatnya produksi kelapa dalam	Jumlah produksi kelapa dalam (ton per tahun)
		Meningkatnya produksi lada	Jumlah produksi lada (ton per tahun)
		Meningkatnya produktivitas kelapa sawit	Tingkat produktivitas kelapa sawit (ton/ha per tahun)
		Meningkatnya produktivitas karet	Tingkat produktivitas karet (ton/ha per tahun)
		Meningkatnya produktivitas kakao	Tingkat produktivitas kakao (ton/ha per tahun)
		Meningkatnya produktivitas kelapa dalam	Tingkat produktivitas kelapa dalam (ton/ha per tahun)
		Meningkatnya produktivitas lada	Tingkat produktivitas lada (ton/ha per tahun)
		Terbanggunya kebun kelapa sawit	Penambahan luas kebun kelapa sawit (hektar)



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ~ 2015

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
		Terbangunnya kebun karet	Penambahan luas kebun karet (hektar)
		Terbangunnya kebun kakao	Penambahan luas kebun kakao (hektar)
		Terbangunnya kebun kelapa dalam	Penambahan luas kebun kelapa dalam (hektar)
		Terbangunnya kebun lada	Penambahan luas kebun lada (hektar)

Selain itu, terdapat juga Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, yaitu :

1. Luas kebun sawit (Juta Ha)
2. Jumlah produk turunan perkebunan (produk)
3. Luas areal komoditas unggulan perkebunan (4 komoditas)
4. Jumlah emisi yang diturunkan
5. Kontribusi industri olahan non migas PDRB triliyun

6. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah rangkaian cara atau langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif dalam rangka meningkatkan persentase keberhasilan pencapaian pembangunan daerah baik secara umum maupun sektoral. Sedangkan Kebijakan merupakan suatu bentuk, hasil, produk, atau fungsi dari suatu kesepahaman melalui analisis panjang terkait rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu permasalahan pembangunan daerah yang dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, & Kebijakan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut :



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ~ 2015

Tabel 2.2. Korelasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, & Kebijakan Renstra
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Visi: Terwujudnya Perkebunan Yang Tangguh Untuk Mendukung Agroindustri dan Ekonomi Hijau				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 1: Meningkatkan produksi komoditi perkebunan				
1.	Meningkatkan Produksi Perkebunan	Meningkatnya produksi, produktivitas, dan terbangunnya kebun kelapa sawit, karet, kakao, kelapa, & lada	Peningkatan produksi perkebunan	Meningkatkan produktivitas komoditi perkebunan
				Meningkatkan luas areal perkebunan
				Penurunan tingkat gangguan usaha dan konflik perkebunan
Misi 2: Meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk				
2.	Meningkatkan produk berstandar nasional dan internasional	Meningkatnya produk berstandar nasional dan internasional	Pembinaan kelompok-kelompok usaha penghasil produk	Penyediaan teknologi budidaya, panen, pasca panen, dan pengolahan hasil
				Penerapan teknologi budidaya yang baik dan benar
3.	Meningkatkan produk primer perkebunan menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi	Meningkatnya nilai tambah produk perkebunan	Peningkatan proses pengolahan komoditas perkebunan	Penyediaan sarana dan prasarana teknologi pengolahan
Misi 3: Memperkuat Aspek Kelembagaan dan Pemasaran				
4.	Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan petani	Meningkatnya kesejahteraan petani pekebun	Penguatan/optimalisasi kelembagaan petani dan kemitraan pemasaran komoditi	Peningkatan kemandirian kelompok tani/gapoktan
				Pengembangan asosiasi petani pekebun
				Peningkatan kemitraan kelompok tani
				Peningkatan kapasitas koperasi sekunder pertanian
5.	Meningkatkan peran dan pembinaan aparatur	Meningkatnya ketersediaan tenaga fungsional dan teknis perkebunan	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur fungsional teknis perkebunan	Rekrutmen dan pelatihan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung kelembagaan



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ~ 2015

Visi: Terwujudnya Perkebunan Yang Tangguh Untuk Mendukung Agroindustri dan Ekonomi Hijau				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 4: Mengembangkan Perkebunan yang Berkelanjutan				
6.	Mewujudkan penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan	Menurunnya emisi gas rumah kaca subsektor perkebunan	Penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan	Pencegahan dan pengurangan emisi limbah perkebunan

7. Program

Program merupakan suatu operasionalisasi dari strategi atau kebijakan pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan dengan cakupan teknis lebih mendalam dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau masyarakat. Dalam pelaksanaannya, setiap program harus dikoordinasikan oleh pemerintah daerah agar selalu berada dalam satu koridor pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara global, dalam hal ini sasaran Renstra Dinas Perkebunan.

Program pembangunan subsektor perkebunan merupakan kristalisasi kebijakan dari strategi Dinas Perkebunan sesuai amanah dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018. Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program maupun kegiatan-kegiatan yang mampu menjawab tantangan pemerintah daerah ke depan sehingga setiap permasalahan dapat diatasi dan isu-isu strategis akan menjadi daya dorong akselerasi pencapaian pembangunan daerah. Setiap program dalam merealisasikan strategi pembangunan memiliki fungsi dan karakter yang berbeda. Meskipun begitu, integral dari program tersebut akan memiliki muara yang sama yakni terwujudnya visi Dinas Perkebunan sebagai lembaga yang dipercaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengelolaan subsektor perkebunan.

Penjabaran dari program-program Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut:

7.1. Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan



Secara umum, subsektor perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Dari segi produksi komoditas perkebunan, kuantitas hasil panen meningkat dari tahun ke tahun terutama pada komoditas unggulan Provinsi Kalimantan Timur yakni kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dalam, dan lada. Selain peningkatan produksi, produktivitas komoditas tertentu seperti kelapa sawit, karet, dan kakao mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan pada periode sebelumnya. Perkembangan produktivitas hasil panen subsektor perkebunan disebabkan karena program pemerintah daerah (dalam hal ini Dinas Perkebunan) dalam mengelola dan manajemen sumber daya perkebunan tepat sasaran terutama dalam hal penambahan luas tanam, kuantitas komoditas, dan optimalisasi pemanfaatan lahan.

Untuk lebih mengembangkan kembali subsektor perkebunan dan melanjutkan tren peningkatan produktivitas, maka pada Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Intensifikasi komoditi perkebunan;
- b. Rehabilitasi komoditi perkebunan;
- c. Peremajaan komoditi perkebunan;
- d. Penyediaan bahan tanaman perkebunan; dan
- e. Identifikasi Blok Penghasil Tinggi (BPT), pengawasan waralaba, penyusunan RDKK Pupuk, dan inventaris plasma nutfah

7.2. Program Perluasan Kebun Sawit

Perluasan kebun sawit merupakan usaha penambahan baku luas lahan perkebunan kelapa sawit yang dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru dan atau pemanfaatan lahan yang sementara tidak diusahakan guna meningkatkan produksi perkebunan komoditas kelapa sawit. Sasaran utama perluasan areal perkebunan kelapa sawit adalah pengembangan perkebunan rakyat. Program ini dilaksanakan karena komoditas kelapa sawit



merupakan komoditas unggulan di Provinsi Kalimantan Timur, selain karena lahan yang cocok bagi komoditas kelapa sawit, juga karena produktivitas kelapa sawit yang cukup lama dan konsisten sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.

Luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur dalam periode 2009-2013 secara keseluruhan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 17,55 persen per tahun yaitu dari 530.554 ha pada tahun 2009 menjadi 1.002.294 ha pada tahun 2013. Sebagai tindak lanjut dari keberhasilan pengembangan komoditas kelapa sawit pada periode sebelumnya, maka pada Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 akan melaksanakan kegiatan berupa "Ekstensifikasi perkebunan sawit".

Program ini akan didukung dengan peningkatan pengolahan produksi kelapa sawit yakni berupa pengembangan pabrik kelapa sawit di beberapa wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Hingga akhir 2013, terdapat 55 pabrik kelapa sawit dari perusahaan swasta yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Timur. Namun karena perkembangan yang cukup signifikan dari komoditas kelapa sawit, maka diperlukan penambahan pabrik kelapa sawit untuk memenuhi peningkatan pengolahan tandan buah segar dari kelapa sawit. Rencana perkembangan pabrik kelapa sawit dapat terlihat pada tabel berikut ini.

7.3. Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit

Komoditas perkebunan unggulan di Provinsi Kalimantan Timur selain kelapa sawit adalah komoditas karet, kakao, kelapa dalam, dan lada. Pada periode sebelumnya, secara umum produksi komoditas non sawit di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan yakni dari hasil panen sebesar 83.225 ton pada tahun 2008 menjadi 73.142 ton pada tahun 2013 atau mengalami rata-rata pertumbuhan -8,86 persen dengan persentase pencapaian target RPJMD hanya sebesar 39,50 persen. Hal ini perlu menjadi



perhatian dalam perencanaan strategis periode mendatang agar dapat mengantisipasi segala faktor yang menyebabkan penurunan produksi serta tidak tercapainya target pembangunan daerah.

Mengingat pentingnya peningkatan produktivitas subsektor perkebunan non sawit untuk memperbaiki capaian kinerja pada periode sebelumnya, maka pada Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Ekstensifikasi penanaman baru komoditi perkebunan;
- b. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih perkebunan; dan
- c. Penyediaan sarana produksi perkebunan.

Sebagai komoditas perkebunan unggulan, komoditas karet, kakao, kelapa dalam dan lada akan dikembangkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur meskipun menjadi prioritas kedua setelah peningkatan produktivitas kelapa sawit. Sebagai *second line* pengembangan subsektor perkebunan, program pembangunan perkebunan non sawit menjadi program yang diunggulkan agar Provinsi Kalimantan Timur memiliki keanekaragaman komoditi perkebunan. Dalam realisasi pelaksanaan program, fokus kegiatan pengembangan perkebunan non sawit adalah dengan cara mengembangkan jumlah produksi baik dari segi kuantitas maupun kualitas pada hasil panen perkebunan non sawit.

7.4. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) petani bertujuan untuk membekali setiap individu pertanian khususnya subsektor perkebunan dalam melakukan budidaya dan pengolahan komoditi perkebunan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan petani.

Untuk mencapai keberhasilan pekebun dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupannya, maka dilaksanakan melalui program pemberdayaan penyuluh pertanian/pekebun lapangan dengan



kegiatan berupa "Pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan dalam rangka pemberdayaan kelompok tani".

7.5 Program Pengembangan Data/Informasi dan Pengendalian Pembangunan Perkebunan

Data atau informasi terkait subsektor perkebunan merupakan sarana yang sangat potensial untuk merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi perkembangan setiap tahapan pelaksanaan program perkebunan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu penting adanya pengolahan data dan informasi melalui analisa dan kajian terhadap segala fenomena yang terjadi selama pelaksanaan program pembangunan. Pengolahan data dan informasi sendiri merupakan suatu sistem dari semua bentuk kegiatan dalam memperoleh dan mengolah data yang terkoordinasi, terintegrasi, dan berinteraksi dari seluruh aktivitas kegiatan penyusunan program/kegiatan.

Ketersediaan data dan informasi merupakan syarat penting dalam proses perencanaan baik dalam hal penyusunan rencana kerja kegiatan, proses pelaksanaan, maupun pada saat pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan subsektor perkebunan. Oleh karena itu, dalam merealisasikan program pengembangan data/informasi dan pengendalian pembangunan perkebunan dibutuhkan kegiatan terstruktur berupa:

- a. Penyusunan data base produksi perkebunan; dan
- b. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.

7.6. Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan

Dalam pengelolaan lahan perkebunan harus dipastikan asal muasal lahan garapan sebagai media utama penanaman komoditas perkebunan. Status lahan merupakan syarat penting dalam penggarapan lahan karena status lahan yang "ambigu" akan berpotensi memberikan masalah pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa lahan



perkebunan yang akan digunakan bebas dari status sengketa baik dengan pihak pemerintah, masyarakat, maupun swasta.

Terdapat beberapa perhatian penting bagi para pekebun dalam mengelola tanah garapan perkebunan terkait perlakuan terhadap lahan garapannya seperti dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca dari aktivitas perkebunan, maka bagi setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup (Undang-Undang No. 18 tahun 2004 Pasal 26).

Dengan demikian agar proses pembangunan subsektor perkebunan tidak terhambat dan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai, maka berdasarkan rencana strategi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur akan merealisasikan kegiatan berupa:

- a. Pembinaan dan penyelesaian konflik usaha perkebunan;
- b. Pengendalian kebakaran lahan, kebun, banjir, kekeringan, dan dampak perubahan iklim; dan
- c. Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan.

7.7. Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan

Pada periode berjalan saat ini, kegiatan pengembangan subsektor perkebunan hanya berupa aktivitas yang menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan di hulu (budidaya tanaman) seperti kegiatan penyiapan calon petani perkebunan, pembinaan kelompok tani, bimbingan budidaya dan cara panen yang benar. Sedangkan kegiatan lanjutan yang berkaitan dengan pengolahan pasca panen tidak mendapatkan porsi pembinaan yang optimal sehingga berdampak pada mutu olahan produk-produk perkebunan yang kurang sesuai dengan standar pasar regional maupun internasional.

Realisasi program ini bertujuan untuk meningkatkan daya tawar produk-produk olahan hasil perkebunan dimana pada



rencana strategis Dinas Perkebunan periode ini akan mengaplikasikan kegiatan berupa:

- a. Pembinaan pasca panen;
- b. Peningkatan jumlah kelompok dalam masyarakat yang memperoleh sertifikasi; dan
- c. Penyediaan teknologi budidaya, pengolahan, dan penanganan hasil pasca panen.

7.8. Program Pengembangan Produk-Produk Perkebunan Unggulan Daerah

Pengolahan dan pengembangan produk-produk hasil perkebunan merupakan salah satu cara dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat petani karena nilai jual hasil perkebunan akan naik dan secara otomatis pendapatan petani juga berbanding lurus. Untuk menyukseskan pengembangan produk-produk perkebunan unggulan daerah perlu dilaksanakan suatu kegiatan yang mampu mendukung *upgrading* kualitas sumber daya manusia yang bergerak di subsektor perkebunan terutama pekebun.

Dalam upaya merealisasikan pengembangan produk-produk perkebunan unggulan daerah, maka Dinas Perkebunan selaku domain dari setiap aktivitas perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan kegiatan berupa:

- a. Pembinaan pengolahan bubuk lada;
- b. Pembinaan pengolahan gula semut; dan
- c. Pembinaan pengolahan nata de coco.

Selain kegiatan yang dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas Perkebunan, terdapat pula beberapa kegiatan yang melibatkan SKPD lain dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Kegiatan lintas SKPD akan diintegrasikan dan dikoordinasikan dengan mengacu pada program pemerintah pusat, provinsi, maupun antar kabupaten/kota. Contoh kegiatan lintas



SKPD tersebut seperti pembangunan dan operasionalisasi kawasan Industri Maloy yang berbasis komoditi perkebunan kelapa sawit.

7.9. Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, perlu adanya inovasi berbagai teknologi terapan menyangkut peningkatan produk-produk perkebunan baik budidaya maupun teknologi pengolahan pasca panen. Penerapan teknologi pada budidaya merupakan perubahan *mindset* pekebun dari sistem tradisional menjadi perkebunan modern, sedangkan realisasi pelaksanaan teknologi terapan pada pengolahan pasca panen akan menghasilkan komoditi produk unggulan daerah yang berdaya saing baik pada tingkat regional maupun global.

Dalam rencana strategi Dinas Perkebunan periode 2013-2018, program peningkatan teknologi terapan perkebunan dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pembinaan pengolahan lump menjadi bahan olahan karet (bokar) bersih, fermentasi kakao, pengolahan lada, dan pengolahan kelapa;
- b. Optimalisasi prasarana dan sarana pekebunan; dan
- c. Penyediaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan.

7.10. Program Penganekaragaman Produk Olahan Perkebunan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk melalui penganekaragaman produk-produk hasil perkebunan. Selama ini produk perkebunan hanya berupa bahan mentah dan masih dalam bentuk baku sehingga nilai di pasaran relatif rendah, padahal realitas di pasar sangat positif merespon berbagai produk olahan hasil perkebunan yang beranekaragam. Oleh sebab itu, perlu adanya program yang melancarkan rantai agribisnis dari hulu ke hilir sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani melalui kegiatan "Pengolahan hasil perkebunan (pasca panen) dan turunannya".



7.11. Program Peningkatan Kemandirian Kelompok Tani

Program ini bertujuan untuk memberdayakan kelompok tani dalam mengelola bantuan pemerintah baik sarana maupun prasarana pengolahan hasil perkebunan. Selama ini, untuk meningkatkan mutu hasil produk perkebunan telah dilakukan berbagai pelatihan dan bimbingan teknis, pemberian bantuan peralatan dan berbagai fasilitas lainnya. Meskipun begitu, masih ditemukan kendala yakni sulitnya mengorganisasi kelompok-kelompok tani agar pemanfaatan bantuan pengolahan tersebut dapat optimal.

Dengan adanya program ini diharapkan optimalisasi pemanfaatan sarana pengolahan dapat tercapai sehingga secara perlahan kelompok tani dapat mengelola sumber daya organisasi secara mandiri dan ekonomis. Realisasi program peningkatan kemandirian kelompok tani dilaksanakan dengan kegiatan, "Pembinaan kelompok tani perkebunan di masing-masing sentra pengembangan perkebunan".

7.12. Program Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Perkebunan

Pembangunan subsektor perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar. Oleh karena itu perlu adanya perhatian pemerintah daerah pada subsektor perkebunan agar konsistensi dan kontinuitasnya dapat terjaga. Dalam rangka pemberdayaan kelembagaan ekonomi perkebunan maka dilaksanakan kegiatan dengan pola kemitraan antara petani produsen dengan perusahaan swasta selaku mitra usaha. Dalam sistem kemitraan ini perlu ditindaklanjuti dengan pelatihan-pelatihan pembinaan serta bimbingan teknis kepada para petani produsen oleh Dinas Perkebunan maupun instansi terkait lainnya yang membidangi sistem kemitraan tersebut.

Dalam membangun sebuah sistem kemitraan usaha ditingkat lapangan, sangat diperlukan kejelasan hak dan kewajiban antara



pekebun dengan perusahaan. Sebagai mitra usaha, perusahaan memerlukan proses-proses CP/CL sampai kepada penetapan petani yang diorganisasikan dalam suatu wadah berupa koperasi/kelompok tani. Kemudian, dengan adanya program revitalisasi perkebunan sebagai proses percepatan pembangunan perkebunan, maka akan mudah bagi perusahaan dengan mitra (koperasi) dalam membangun kebun dengan suku bunga yang disubsidi oleh pemerintah melalui pembiayaan dari pihak bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat

Perwujudan dari program tersebut akan meningkatkan kemandirian terhadap pemberdayaan kelembagaan petani khususnya dalam membangun perekonomian masyarakat. Dalam mencapai pemberdayaan kelembagaan tersebut, maka dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penguatan kelembagaan petani;
- b. Pelatihan, pembinaan, pendampingan dalam rangka pemberdayaan koperasi perkebunan; dan
- c. Pembinaan dan pendampingan asosiasi / koperasi petani pekebun;

7.13. Program Peningkatan Pemasaran dan Hasil Produksi Perkebunan

Persaingan global merupakan tantangan besar dalam pembangunan daerah khususnya subsektor perkebunan. Persaingan tersebut menuntut adanya kreativitas dalam mengolah hasil produk-produk perkebunan sehingga memiliki nilai tambah, nilai jual, dan berdaya saing lebih dibandingkan produk olahan lain. Meskipun begitu, salah satu poin penting dalam persaingan produk di pasar adalah bagaimana menyempurnakan sistem *marketing* dengan menggunakan promosi melalui *branding* pada pasar.

Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan nilai produk hasil perkebunan di pasaran adalah dengan memfasilitasi terbentuknya unit pengolahan dan pemasaran terpadu melalui



sistem agroindustri modern. Diharapkan unit tersebut akan memperkecil kerugian di level pekebun karena mutu produk yang dihasilkan lebih beragam dan informasi harga di pasar menghindarkan pekebun dari permainan harga oleh tengkulak. Upaya ini akan memiliki analisis terhadap perkembangan situasi pasar komoditas perkebunan yang meliputi *supply-demand*, harga, situasi pasar lokal, nasional, bahkan global sehingga diperoleh strategi-strategi untuk mengantisipasi secara efektif segala situasi yang terjadi.

Realisasi dari program peningkatan pemasaran dan hasil produk perkebunan dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Promosi atas hasil produksi perkebunan;
- b. Pembangunan pusat-pusat pengembangan produksi hasil perkebunan;
- c. Penelitian (uji terap) dan pengembangan hasil produksi perkebunan; dan
- d. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi perkebunan masyarakat.

7.14. Program Pemberdayaan Aparat Fungsional Khusus Teknis Perkebunan

Program pemberdayaan aparatur fungsional khusus teknis perkebunan mempunyai fungsi dan peranan yang strategis dalam rangka mendukung kinerja teknis pengendalian OPT pada UPTD-P2TP. Untuk mendukung fungsi strategis tersebut perlu adanya dukungan penyediaan sarana dan prasarana teknis fungsional serta pengembangan SDM fungsional melalui sosialisasi, seminar, lokakarya, magang, dan sebagainya. Dalam pencapaian program tersebut dilaksanakan kegiatan "Pelatihan/magang pada instansi terkait" sebagai acuan pengetahuan bagi aparatur pemerintahan yang bergerak di bidang perkebunan.



7.15. Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan

Dalam beberapa periode terakhir ini, pembangunan di sektor pertanian sedang menjadi sorotan dunia internasional. Selain karena keterkaitannya dengan isu pangan dunia, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang berpotensi menyumbang peningkatan kualitas lingkungan hidup begitu juga sebaliknya dapat menjadi penyebab degradasi lingkungan. Pada kasus yang menjadi sorotan publik khususnya di subsektor perkebunan adalah komoditas kelapa sawit dimana komoditas tersebut dianggap tidak sesuai dengan asas perkebunan berkelanjutan dan tidak ramah lingkungan karena menyebabkan berkurangnya penangkapan air dan penggunaan pupuk yang berlebihan sehingga meracuni lingkungan di areal perkebunan.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, perlu adanya sistem pengelolaan perkebunan sehingga arah pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan dapat terealisasi tanpa mengorbankan pembangunan ekonomi pada umumnya dan khususnya pengembangan subsektor perkebunan. Oleh sebab itu, dalam mengimplementasikan program pembinaan perkebunan berbasis pembangunan berkelanjutan maka dalam rencana strategi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 akan dilaksanakan kegiatan:

- a. Memanfaatkan lahan kritis untuk pengembangan usaha perkebunan;
- b. Pengembangan biomassa sebagai energi terbarukan dari perkebunan;
- c. Fasilitasi integrasi sawit-sapi;
- d. Penerapan kebijakan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan;
- e. Pembinaan dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida; dan



- f. Pembinaan dan pemanfaatan pestisida nabati, penggunaan musuh alami, agensia pengendali hayati.

7.16. Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat

Salah satu penyebab menurunnya produktivitas usaha budidaya komoditas perkebunan adalah terjadinya serangan hama dan penyakit yang menyerang tanaman perkebunan. Sesuai UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, pelaksanaan perlindungan tanaman dilakukan dengan Sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Sistem PHT mendorong dikembangkannya cara-cara pengendalian OPT dengan spesifikasi lokasi sesuai kondisi yang ada serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem budidaya tanaman. Selain itu, sistem ini juga merupakan pengamanan hasil produk perkebunan dalam rangka pengembangan sistem dan usaha agribisnis perkebunan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berkerakyatan. Oleh sebab itu, dalam rangka menyesuaikan perubahan paradigma konsumen terhadap produk yang dikonsumsi serta dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan konsumen, maka dapat dilakukan beberapa kegiatan untuk menyukseskan program pengendalian hama terpadu perkebunan rakyat, seperti:

- a. Pelatihan SL-Pemandu Lapang;
- b. Pelatihan Petani SL-PHT;
- c. Pemantauan dan peramalan OPT perkebunan;
- d. Identifikasi dan pengendalian OPT perkebunan; dan
- e. Pengembangan dan perbanyakan Agents Pengendali Hayati (APH).
- f. Uji terap aplikasi Agens Pengendali Hayati dan pestisida nabati
- g. Fasilitasi brigade proteksi perkebunan.



B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 memuat sasaran strategis yang sesuai dengan rencana strategis beserta indikator kinerja dan target, yang dapat dilihat pada lampiran.

C. PENETAPAN KINERJA (PK)

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018 disusunlah Penetapan Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015. Penetapan Kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan dalam hal ini Gubernur sebagai pengambil kebijakan dan pimpinan SKPD sebagai pelaksana kebijakan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Adapun tujuan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
2. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya
3. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
5. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) / sanksi (punishment)



Penetapan Kinerja memuat dua unsur pokok yaitu pernyataan penetapan kinerja yang harus ditandatangani oleh penanggungjawab program dengan atasan langsung dan lampiran yang berisi tentang target capaian yang ditetapkan bersama yang akan dicapai pada akhir periode penganggaran. Penetapan Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 sebagaimana dalam lampiran laporan ini.